



2023

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk pencapaian sampai dengan bulan Desember dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2023, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah yang terukur dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mencapai peningkatan kinerja menjadi lebih baik

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah fungsi utamanya sebagai koordinator dalam melaksanakan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah kegiatan yang bersifat rutinitas dan ada beberapa program atau kegiatan yang sifatnya sekali jalan. Dengan demikian penetapan sasaran dan target pada Indikator Kinerja Utama bukanlah merupakan akumulasi kinerja selama tahun renstra yaitu tahun 2021 s/d 2026, namun merupakan sasaran dan target untuk pelaksanaan satu tahunan.

Dari 6 point Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik pada kondisi berhasil. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah kedepan adalah Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan IKU supaya lebih fokus pada tupoksi Sekretariat Daerah dalam menunjang pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, Perlu dirumuskan kembali program-program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target sasaran dengan mengefisienkan jumlah program dan kegiatan yang fokus pada pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2023 menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama diantaranya menyebutkan tentang urusan pendukung seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	- Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	70,00 (BB)	70,00 (BB)	68.00(B)	80%
	- Scor Nilai LPPD	3,215	3,215	3,2090	100%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	80	82	B (82.00)	85%
4	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	96,50%

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya system pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 80%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan

yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karena itu upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (*trickle down effect*) bagi kemajuan daerah.

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil. Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 adalah P-3 (Cukuf Efektif). Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor potensi dan unggulan daerah

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur. Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya unkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu. Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan ongkos produksi akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat.

Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 88,%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan. Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata. Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

Pengembangan daerah destinasi wisata alam di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 90,%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai. Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

Lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inovasi akan berakibat organisasi yang kurang berkembang dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyarakat, kritikan, dan apatis bagi institusi itu sendiri. Oleh karena itu Kabupaten Pesisir Selatan dengan kreativitas dan inovasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin maju harus menguatkan di internalnya terlebih dahulu, dengan demikian ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika menghadapi permasalahan eksternal organisasi dapat diatasi. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 85 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga. Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tentram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar

seluruh masyarakat menjadi Bahagia.

Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan. Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 86%.

Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Maksud dan Tujuan	01
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	02
D. Identifikasi Permasalahan	06
E. Isu Strategis	07
BAB II PERENCANAAN KINERJA	08
2.1. Rencana Strategis	08
2.2. Perjanjian Kinerja	09
2.3. Indikator Kinerja Utama	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Metodologi Penelitian Capaian Target Kinerja	23
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	23
3.3. Capaian Kinerja	25
3.4. Akuntabilitas Keuangan	26
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2023. Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban ke Bupati atas capaian Kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di tahun 2023
2. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

3. Memberikan informasi perkembangan realisasi an keuangan dan fisik kegiatan yang dikelola Sekretariat Daerah
4. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
5. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
6. Proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Tujuan Laporan

Laporan kinerja Sekretariat Daerah bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang saat ini dipimpin oleh Mawardi Roska, S.IP.

Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bapak Bupati.

Tugas

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi diatas, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut;

1. Penyusunan Pola Dasar, Visi, Misi pedoman dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Keuangan Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Sekretariat Daerah;
4. Menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Daerah;
5. Membuat Laporan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan untuk memfasilitasi bidang tugas Pemerintahan Daerah.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan ; dan
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 182 Pegawai yang terdiri dari 104 orang Pegawai PNS dan 78 Pegawai Non PNS sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	1 Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	6 Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a	10 Orang
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	1 Orang
5.	Fungsional Tertentu	29 Orang
6.	Fungsional Umum (PNS)	57 Orang
7.	Staf Pelaksana (Kontrak)	78 Orang
	JUMLAH	182 Orang

Tabel 2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	28 Orang
2.	Golongan III	60 Orang
3.	Golongan II	16 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
5.	Non PNS	78 Orang
	JUMLAH	182 Orang

Tabel 3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2	26 Orang
2.	S1	60 Orang
3.	DIII	5 Orang
4.	SLTA	15 Orang
5.	SLTP	1 Orang
	JUMLAH	107 Orang

D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Kurangnya pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Belum tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data - data kepegawaian serta arsip – arsip kepegawaian secara *on line / komputerisasi*.
3. Kurangnya pengendalian dari beberapa PPTK terkait pengelolaan laporan kemajuan fisik kegiatan yang menyebabkan keterlambatan laporan di Sekretariat Daerah
4. Masih belum memadainya sarana jaringan yang ada dalam rangka mendukung pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat Daerah
5. Belum adanya prosedur dan aturan yang dihasilkan tim tentang kebijakan dan pengawasan jasa konstruksi.
6. Pemberian bonus, honor peserta dan pelatih pelaksana MTQ Provinsi masih terlalu kecil.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara penyaluran hibah dan bantuan sosial lainnya yang tersedia pada anggaran Sekretariat Daerah.
8. Belum terlaksananya validasi terhadap data guru TPA/TPQ dan MDTA
9. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya kegiatan penyusunan LPPD.
10. Masih kurangnya kesadaran aparatur dalam penegakan disiplin untuk mengikuti apel pagi serta upacara hari besar lainnya.
11. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan.

E. Isu Strategis

Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
3. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
4. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
6. Menekan dampak permasalahan budaya masyarakat dengan peningkatan aktivitas perekonomian berbasis pariwisata yang menjadikan kunjungan wisatawan sebagai sumber pemasukan PAD sehingga akan meningkatkan Pendapatan dan meningkatkan alokasi anggaran belanja kegiatan.
7. Pengembangan sarana dan prasara penunjang daerah untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan dan meminimalisir dampak negative atau pengaruh buruk akibat kedatangan wisatawan tersebut.
8. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
9. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
10. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
11. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Dokumen - dokumen perencanaan tersebut secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang dapat dijelaskan pada :

2.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode pembangunan lima tahun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah ***Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.***

2.1.2. Misi

Misi pembangunan adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Misi pembangunan tahun 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2023 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja Sekretaria Daerah tahun 2023 berpedoman kepada pada Revisi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja Tinggi	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70,00 (BB)	72,00 (BB)	
		Skor Nilai LPPD	3,2150	3,2230	
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (B)	84 B)	
		Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	80%	80%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
		Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Org	114 Org	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Jumlah ASN yang menerima honor pengelola keuangan Sekretariat Daerah	18 Orang	18 Orang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan (Persediaan , Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	12 Laporan (Persediaan , Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439 kali	439 kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Arsip	1500 Arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	15 Unit	15 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Set	1 Set	Pengadaan Mebel
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	1500 Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	85 unit	85 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah mobil jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit Mobil/44 Unit Motor	24 Unit Mobil/44 Unit Motor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	Pemeliharaan Mebel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah dana yang tersedia untuk biaya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	70 Stel	70 Stel	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumahtangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Jumlah dana Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Jumlah dana Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		Jumlah dana Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
		Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	Penataan Organisasi
		Jumlah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati	1 Perda, 1 Perbub	1 Perda, 1 Perbub	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah rancangan peraturan kepala daerah dan peraturan bupati	10 Ranperbub	10 Ranperbub	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah OPD yang melakukan penyusunan penataan jabatan perangkat daerah	40 OPD	40 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah OPD yang dievaluasi terhadap system informasi pelayanan publik	42 OPD	42 OPD	Fasilitas pelayanan publin dan tata laksana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Fasilitasi kompetisi, inovasi, Pelayanan Publik	1 Inovasi	1 Inovasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan untuk Peta Proses Bisnis	42 OPD	42 OPD	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah cakupan nilai Reformasi Birokrasi yang ditargetkan setiap tahun	BB	BB	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Jumlah OPD yang di Monitoring dan diEvaluasi terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan	3 OPD	3 OPD	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Nilai LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	BB	BB	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja sama media	12 Bulan	12 Bulan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Keprotokolan untuk pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	Fasilitasi Keprotokolan
		Jumlah kegiatan Pimpinan di berbagai media masa yang diliput	28 Media	28 Media	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Jumlah peliputan pembuatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	180 liputan dan dokumentasi	180 liputan dan dokumentasi	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		Persentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	100%	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	100%	100%	Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Kecamatan yang ikut penilaian kompetensi camat tingkat kabupaten dan tingkat propinsi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Persentase Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Kecamatan	100	100	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen laporan, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban otonomi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk minhasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan masyarakat	100%	100%	
	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di masjid/mushala	90%	90%	
		Persentase Pemenuhan kewajiban membayar zakat	96,40%	96,40%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	79 Kali	79 Kali	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah ceramah agama yang dilakukan	22 kali	22 kali	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah Haji yang difasilitasi	150 orang	150 orang	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah kecamatan yang memiliki Lembaga didikan subuh yg dibina	15 kecamatan	15 kecamatan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah koordinasi konsultasi kesra dan urusan keagamaan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Tingkat Provinsi	7 Mesjid	7 Mesjid	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah Safari Pemda yang dilakukan	55 kali	55 kali	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan social kepada masyarakat yang terkena bencana alam	15 kecamatan	15 kecamatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Jumlah mahasiswa pengembangan kampus UNP di Pesisir Selatan (biaya Pendidikan) yang dibantu	125 mahasiswa	125 mahasiswa	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	100%	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 dokumen	500 dokumen	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Jumlah laporan Data KKP HAM dan Aksi Ham B4, 88, B12	10 laporan	10 laporan	Fasilitasi Bantuan Hukum
		Jumlah perkara Hukum Pemda yang diselesaikan	3 perkara	3 perkara	Fasilitasi Bantuan Hukum
		Jumlah berita daerah yang dipublikasikan	50 buku	50 buku	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Jumlah daerah yang dipublikasikan	250 buku	250 buku	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	5 MOU	5 MOU	Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 MOU	5 MOU	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Jumlah Laporan Pelaksanaan pengawasan Pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Laporan	1 Laporan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Persentase penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	100%	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
		Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Jumlah Buku ASB yang Dicetak	60 Buku	60 Buku)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD yang Dicetak	75 Buku	75 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Buku susdur yang Dicetak	75 Buku	75 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Buku harga satua yang Dicetak	45 Buku	45 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah koordinasi pembangunan daerah yang dilakukan	8 kali	8 kali	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Jumlah Buku Laporan pelaksanaan pembangnan daerah yg dicetak	96 buku	96 buku	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		Persentase Proses Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	100%	100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah paket proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan aturan yang berlaku serta tersedianya perangkat dan system untuk pengadaan barang dan jasa	1 paket	1 paket	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah OPD yang difasilitasi Pengadaan Secara Elektronik	41 Dokumen	41 Dokumen	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
		Jumlah personal yang mengisi jabatan fungsional dan pengembangan kompetensi pengadaan barang dan jasa serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang	4 Orang	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
		Persentase pelaksanaan Koordinasi pengawasan usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi	100 %	100 %	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi, pengawasan yang menggunakan air tanah	15 kecamatan	15 kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada misi 1 dan misi 5 sebagaimana yang tertuang pada RPJMD 2021 - 2026 sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- b. Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,00 (BB)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)
		Skor Nilai LPPD	3,2090	3,2150	3,2230	3,2290	3,2340	3,2400

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan						
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	80.00	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00
4	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%
		Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Rendah (<= 10 Orang)	Rendah (<= 10 Orang)	Sedang (11 s/d 20 Orang)	Sedang (11 s/d 20 Orang)	Tinggi (>= 21 Orang)	Tinggi (>= 21 Orang)

III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Sekretariat Daerah bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, yang perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2023			
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	70,00 (B)	72,00 (BB)	69.21(B)	95 %	Sangat Berhasil
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	82	82	B (82.00)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,50%	96,50%	96,50%	100%	Sangat Berhasil

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2023			
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Masjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	100%	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai ukuran keberhasilan dari Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang merupakan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 7
Realisasi IKU Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2023			
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	70,00 (BB)	72,00 (BB)	69,21 (B)	90%	Sangat Berhasil
	Skor Nilai LPPD Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang tercapai target	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3,2150	3,2230	3,2150	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukup Efektif)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	82	82	B (82.00)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,50%	96,50%	96,50%	100%	Sangat Berhasil

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2023			
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	100%	Sangat Berhasil

3.3. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis tahun 2023 dibandingkan dengan target sasaran kinerja tahun terakhir periode Renstra (2023). Mengetahui kemampuan Sekretariat Daerah dalam mencapai target sasaran kinerja sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Target Sasaran Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2023
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	69,21 (B)	72,00 (BB)
	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai	3,2090	3,2150
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	Nilai	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukup Efektif)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	Nilai	82	82
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	Persentase	96,50%	96,50%
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Persentase	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 28.652.395.158,- atau 92,96 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 30.823.861.149,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.008.307.394,- dengan relisasi sebesar Rp. 12.377.115.879,- atau 95,15 untuk Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 13.633.702.609,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.452.074.131,- atau 91,33 sedangkan untuk Belanja Hibah dari anggaran Rp. 3.887.953.652,- terealisasi sebesar Rp. 3.542.953.652,- atau 91,33 dan Belanja Hibah dengan anggaran Rp. 211.897.494,- terealisasi sebesar Rp. 202.251.496,- atau sebesar 95,45 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Realisasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	13.008.307.394,-	12.377.115.879,-	95,15
Belanja Barang dan jasa	13.633.702.609,-	12.452.074.131,-	91,33
Belanja Hibah	3.887.953.652,-	3.542.953.652,-	91,13
Belanja Modal	211.897.494,-	202.251.496,-	95,45
JUMLAH	30.823.861.149,-	28.652.395.158,-	92,96

A. Belanja Pegawai

Dari Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. **13.008.307.394,-** terealisasi sebesar Rp **12.377.115.879,-** atau **95,15 %**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
I	Belanja Operasi			
	1. Belanja Pegawai	13.008.307.394,-	12.377.115.879,-	95,15
	1.1. Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.925.367,-	7.676.960.446,-	95,13
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS	3.567.336.500,-	3.446.678.751,-	96,62
	1.1. Tambahan Pengehasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	277.250.000,-	268.920.000,-	97,00
	1.2. Belanja gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	543.795.527,-	434.556.682,-	79,91
	1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	550.000.000,-	550.000.000,-	100,00
	Jumlah Belanja Pegawai	13.008.307.394,-	12.377.115.879,-	95,15

B. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi jumlah Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar **Rp. 12.452.074.131,-** atau **91,33 %** dari anggaran **Rp. Rp. 13.633.702.609,-** dengan rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	Belanja Barang dan Jasa	13.633.702.609,-	12.452.074.131,-	91,33
3.0	Belanja Barang	3.189.751.844,-	2.982.195.388,-	93,49
3.0.1	Belanja Barang Pakai Habis	3.189.520.964,-	2.982.195.388,-	93,49
3.0.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	230.880.-	-	0
3.1	Belanja Jasa	4.514.725.040,-	4.023.733.005,-	89,12
3.1.1	Belanja Jasa Kantor	4.264.226.295,-	3.791.867.464,-	88,92
3.1.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	67.498.745,-	61.865.541	91,65
3.1.3	Belanja Sewa Peralatan Mesin	153.000.000,-	152.000.000,-	99,35
3.1.4	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.000.000,-	18.000.000,-	60,00
3.2	Belanja Pemeliharaan	1.099.550.000,-	901.943.621,-	82,03

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.2.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	896.750.000,-	717.956.601,-	80,06
3.2.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	162.800.000,-	147.639.020,-	90,69
3.2.3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.000.000,-	36.348.000,-	90,87
3.3	Belanja Perjalanan Dinas	4.089.675.725,-	3.820.620.045,-	93,42
3.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.089.675.725,-	3.820.620.045,-	93,42
3.4	Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	740.000.000,-	723.582.072,-	97,78
3.4.1	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	740.000.000,-	723.582.072,-	97,78
	JUMLAH	13.633.702.609,-	12.452.074.131,-	91,33

C. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp 3.542.953.652,-** atau **91,13 %** dari anggaran **Rp 3.887.953.652,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV	Belanja Hibah	3.887.953.652,-	3.542.953.652,-	91,13
4.0.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	135.000.000,-	0,-	0
4.0.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.752.953.652,-	3.542.953.652,-	94,40
	JUMLAH	3.887.953.652,-	3.542.953.652,-	91,13

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp 78.000.000,-** atau **95,12 %** dari anggaran **Rp 82.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
V	Belanja Bantuan Sosial	82.000.000,-	78.000.000,-	95,12
5.0	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	82.000.000,-	78.000.000,-	95,12
5.0.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	82.000.000,-	78.000.000,-	95,12
	JUMLAH	82.000.000,-	78.000.000,-	95,12

e. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp 202.251.496,-** atau **95,45 %** dari anggaran **Rp 211.897.494,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
VI	Belanja Modal	211.897.494,-	202.251.496,-	95,45
6.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.897.494,-	202.251.496,-	95,45
6.0.1	Belanja Modal Alat Angkut	19.800.000,-	12.005.000,-	60,63
6.0.2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.000.000,-	56.935.900,-	99,89
6.0.3	Belanja Modal Komputer	135.097.494,-	133.310.596,-	98,69
	JUMLAH	211.897.494,-	202.251.496,-	95,45

Belanja Modal yang tercantum pada data di atas merupakan belanja modal yang tercatat berdasarkan angka yang tercantum pada SP2D atau dalam fungsional Pengeluaran.

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan Belanja Langsung, Sekretariat Daerah melaksanakan **3 program dan 16 kegiatan**.

Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	70,00 (B)				
	SKOR LPPD	3,2150				
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	P-3(Cukup Efektif)				
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	82				
		100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.645.396.625	21.287.522.608	94,62 %
		100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.997.563	250.970.591	99,20
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.699.507.654	11.613.662.235	99,27 %
		104 Org	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.638.261.867	11.123.639.197	95,57%
		12 bulan	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	543.795.527	434.556.682	79,91%
		4 Dokumen	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	252.997.563	250.970.591	99,20

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		12 bulan	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60.245.787	55.466.356	92,07
		100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.527.291.060	1396.737.269	99,11 %
		12 bulan	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.011.605	81.746.500	96,16
		12 bulan	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.621.548	80.287.588	99,59
		12 bulan	9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	274.025.000	197.000.244	71,89
		12 bulan	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	794.825.125	790.710.965	99,48
		1500 Arsip	11 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.014.740	3.360.000	83,69
		15 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.976.514	70.611.596	98,10
		7 Unit	12 Pengadaan Mebel	7.000.000	7.000.000	100,00
		8 Unit	13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.976.514	63.611.596	97,90
		12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.140.762.500	2.817.519.193	89,71
		1500 surat	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.999.750	87.763.250	99,73
		12 Bulan	15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.319.000.000	1.097.626.658	83,22
		12 Bulan	16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.762.750	94.815.000	89,65
		40 orang	17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.628.000.000	1.537.314.285	94,43
		85 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.775.000	1.067.022.846	80,73

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		4 Unit	18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.775.000	325.555.212	69,75
		33 Unit Mobil/48 Unit Motor	19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	476.200.000	387.730.614	81,42
		12 Bulan	21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.000.000	181.655.000	95,11
		2 Unit/12 bulan	22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.800.000	72.753.000	82,86
		2 Unit	23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.329.020	99,33
		12 Bulan	24 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.403.795.527	826.348.160	58,87
		70 stel	25 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	249.993.960	100,00
		2 Orang	26 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	26.354.200	43,92
		±400 Org	27 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	550.000.000	550.000.000	100,00
		12 Bulan	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.620.241.800	1.546.755.797	95,46
		12 Bulan	28 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.052.154.000	1.036.570.300	98,52
		12 Bulan	29 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	398.178.000	349.881.497	87,87

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		12 Bulan	30 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	169.909.800	160.304.000	94,35
		100%	Penataan Organisasi	128.916.525	128.845.288	99,94
		B	33 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	128.916.525	128.845.288	99,94
		12 Bulan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.845.900.524	2.714.816.311	95,39
		12 Bulan	35 Fasilitasi Keprotokolan	154.586.830	143.594.612	92,89
		28 Media massa	36 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.691.313.694	2.571.221.699	95,54
		100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.639.502.006	6.040.807.127	95,85
		100%	Administrasi Tata Pemerintahan	133.499.339	133.431.000	99,95
		4 kali	38 Penataan Administrasi Pemerintahan	133.499.339	133.431.000	99,95
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	96,50%				
		79 Kali	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.267.012.252	5.741.510.047	91,61
		22 kali	41 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.974.069.000	1.821.828.608	92,29
		15 kecamatan 125 mahasiswa	42 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.292.943.252	3.919.681.439	91,31
		12 Bulan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	238.990.415	165.866.080	69,40
		500 dokumen	44 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	238.990.415	165.866.080	69,40

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		5 MOU	Fasilitasi Kerjasama Daerah	133.499.339	133.431.000	99,95
		100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.086.041.772	1.020.167.615	93,93
		100%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	160.958.520	157.127.320	97,62
		100%	48 Koordinasi Singkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	72.360.120	96,48	100,00%
		1 Laporan (Inflasi, TPAKD)	49 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	85.958.475	84.767.200	98,61
		100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	89.999.580	86.718.330	96,35
		60 buku	51 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	24.931.738	24.323.180	97,56
		8 kali	52 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	33.229.050	94,76	95,76%
		96 buku	53 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	29.166.100	97,22	100,00%
		100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	288.004.418	287.437.906	99,80
		100 paket	54 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	87.671.707	87.531.860	99,84
		45 OPD	55 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	200.332.711	199.906.046	99,79
		4 Orang	56 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
			JUMLAH	30.823.861.149	28.652.395.158	92,96

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 6 (enam) Capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan terdapat 2 (dua) capaian sasaran yang mempunyai capaian indikator sasaran mencapai 100 % yaitu "Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dan Meningkatkan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan masyarakat". Untuk nilai terendah dari 6 (enam) Sasaran yang telah ditetapkan tersebut dengan nilai 68,00 yaitu sasaran "Terwujudnya Pemerintah yang akuntabel dan berkinerja"

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) capaian indikator kinerja yang ditetapkan terdapat indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 3 (tiga) capaian indikator kinerja yang mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100 % yaitu (1) "Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik" (2) "Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta", (3) "Tingkat Persentase Subuh Berjamaah" dan untuk nilai terendah dari 4 (empat) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut dengan realisasi 68,00 yaitu "Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran


Belanja Sekretariat Daerah untuk tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 28.652.395.158,-** atau **92,96 %** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 30.823.861.149,-** sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah. Maka khusus belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar **Rp. 434.556.682,-** atau **79,91 %** dari anggaran **Rp. 543.795.527,-** Sedangkan untuk Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH terealisasi sebesar **Rp. 550.000.000,-** dari anggaran sebesar **Rp. 550.000.000,-** atau **100 %**

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan pencapaian dan peningkatan kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah diharapkan melakukan hal sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan diklat dalam rangka Pengembangan perencanaan pembangunan secara lebih aspiratif.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
3. Inovasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendorong akuntabilitas publik serta keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja tahun 2023
5. Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pengukuran kinerja untuk memenuhi indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah ini dibuat, semoga dapat dijadikan salah satu bahan informasi dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP.19670907 198902 1 001